

KLIPING BERITA

JUMAT, 12 AGUSTUS 2022



BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Drs. Asrul
Wakil Walikota
Padang Panjang



H. Fadly Amran, BBA
Walikota Padang Panjang

bangga
melayani
bangsa



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KLIPING BERITA



Nama Media : Harian Singgalang

TPID Pd. Panjang Laksanakan Evaluasi Pemantauan Harga Pangan

Padang Panjang, Singgalang

Guna mengevaluasi pelaksanaan pemantauan harga pangan strategis di Kota Padang Panjang, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Padang Panjang melaksanakan Rapat Teknis di Ruang VIP Balai Kota, Rabu (10/8).

Asisten Administrasi Umum, Martoni yang memimpin rapat menyampaikan, pemantauan harga pangan strategis penting dilakukan setiap hari untuk mengetahui perkembangan ketersediaan pasokan pangan dan kemampuan membeli masyarakat yang berujung pada perhitungan inflasi daerah.

Dari hasil evaluasi yang dilakukan dalam rapat tersebut, diperoleh informasi bahwa pe-

mantauan harga pangan strategis yang secara teknis dilakukan petugas Dinas Pangan dan Pertanian (Dispangtan) dan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Disperdakop UKM) di lapangan telah berjalan lancar setiap hari kerja tanpa kendala yang cukup berarti.

Pemantauan dilakukan dengan metode yang teruji sesuai ketentuan di Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan. Dengan demikian maka data yang dihasilkan juga merupakan data yang cukup reliable (dapat diandalkan).

Sesuai dengan program kerja TPID Kota Padang Panjang, maka data dari kedua OPD tersebut dikirim secara real

time oleh petugas lapangan dengan menggunakan aplikasi Udajang dan info-pangan Padang Panjang untuk diverifikasi Tim Verifikator dari Sekretariat TPID Kota Padang Panjang.

"Data yang sudah diverifikasi otomatis tampil sebagai info pangan. Masyarakat yang ingin mengetahui harga 45 komoditi pangan hari itu, dapat mengaksesnya melalui aplikasi Udajang mulai pukul 14.00 WIB. Aplikasi Udajang adalah aplikasi yang mengelola informasi resmi Pemerintah Kota Padang Panjang yang bisa didownload di Play Store," jelasnya.

Selain itu rapat juga membahas penguatan publikasi informasi harga ini melalui media website kota, videotron dan

aksesibilitas harian kepada pimpinan daerah melalui Command Center Kota Padang Panjang.

Rapat diikuti Kepala Bagian Perekonomian dan SDA, Putra Dewangga selaku Ketua Tim Teknis TPID Kota Padang Panjang dan dihadiri anggota TPID diantaranya Kabid Perdagangan dan Industri Disperdakop UKM, Kabid Ekonomi SDA dan Infrastruktur Bappeda, Statistisi Ahli Muda Dinas Kominfo, Perencana Ahli Muda Bappeda, Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda Dispangtan, Pengawas Perdagangan Ahli Muda Disperdakop UKM dan Badan Pusat Statistik Kota Padang Panjang yang diwakili Rindy Primadini. (205)



Nama Media : Harian Posmetro Padang

Konsistensi Menanggulangi Kemiskinan

Wawako Asrul Instruksikan TKPK Dioptimalkan



rahmadposmetro

RAPAT KOORDINASI— Wawako Asrul memimpin Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Padangpanjang, Kamis (11/8).

UPAYA menanggulangi kemiskinan di Kota Padangpanjang, Wakil Wali Kota, Asrul minta tugas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dioptimalkan. Hal tersebut ditegaskan Wawako dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Padangpanjang 2022, Kamis (11/8) di Ruang Rapat Bappeda.

Wawako Asrul mengatakan, ada beberapa kebijakan penanggulangan kemiskinan di Pemko. Di antaranya, kebijakan pertumbuhan ekonomi, kebijakan pemenuhan hak

dasar, kebijakan perluasan kesempatan kerja, dan kebijakan percepatan pembangunan kelurahan.

"Angka kemiskinan Kota Padang Panjang selama tahun 2021 berada pada angka 5,92 persen. Untuk target penurunan angka kemiskinan tahun ini ditargetkan pada angka 5,64 persen dan pada 2023 diangka 5,36 persen," sebutnya.

Kepala Bappeda, Rusdianto, S.IP, M.M mengatakan, dalam penanggulangan kemiskinan, ada beberapa kendala. Yakni keterpaduan vali-

dasi data terbatas, integrasi program kegiatan masih kurang, pendanaan yang masih terbatas, pola kemitraan belum optimal.

Terkait hal tersebut, dikatakannya, pentingnya updating Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sesuai perkembangan, optimalisasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan OPD. Serta, optimalisasi keterlibatan unsur terkait dalam penanganan kemiskinan sesuai arahan wali kota dan wakil wali kota.

Sementara itu, Asisten III Setdako, Martoni, S.Sos, M.Si berkesempatan memaparkan hasil studi tiru yang dilakukan TKPK ke Pemko Bandung dan Pemko Cimahi pada 3 Juli lalu.

"Dari kunjungan tersebut, ada beberapa hal yang dapat diadopsi untuk Padang Panjang. Seperti perda tentang penanggulangan kemiskinan, sistem informasi, aplikasi penyusunan RPKD dan LPKD, dan sistem informasi data ketenagakerjaan dan pelatihan terintegrasi," tuturnya. (rmd)

TPID Evaluasi Hasil Pemantauan Harga Pangan

Guna mengevaluasi pelaksanaan pemantauan harga pangan strategis di Kota Padang Panjang, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Padangpanjang melaksanakan Rapat Teknis di Ruang VIP Balai Kota, Rabu (10/8).

Asisten Administrasi Umum, Martoni, S.Sos, M.Si yang memimpin rapat menyampaikan, pemantauan harga pangan strategis penting dilakukan setiap hari untuk mengetahui perkembangan ketersediaan pasokan pangan dan kemampuan membeli masyarakat yang berujung pada perhitungan inflasi daerah.

Dari hasil evaluasi yang dilakukan dalam rapat tersebut, diperoleh informasi bahwa pemantauan harga pangan strategis yang secara teknis dilakukan petugas Dinas Pangan dan Pertanian (Dispangtan) dan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Disperdakop U-KM) di lapangan telah berjalan

lancar setiap hari kerja tanpa kendala yang cukup berarti.

Pemantauan dilakukan dengan metode yang teruji sesuai ketentuan di Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan. Dengan demikian maka data yang dihasilkan juga merupakan data yang cukup reliable (dapat diandalkan).

Sesuai dengan program kerja TPID Kota Padang Panjang, maka data dari kedua OPD tersebut dikirim secara real time oleh petugas lapangan dengan menggunakan aplikasi Udajang dan info-pangan Padangpanjang untuk diverifikasi Tim Verifikator dari Sekretariat TPID Kota Padangpanjang.

"Data yang sudah diverifikasi otomatis tampil sebagai info pangan. Masyarakat yang ingin mengetahui harga 45 komoditi pangan hari itu, dapat mengaksesnya melalui aplikasi Udajang mulai pukul 14.00 WIB. Aplikasi Udajang adalah aplikasi yang mengelola infor-

masi resmi Pemerintah Kota Padangpanjang yang bisa di-download di Play Store," jelasnya.

Selain itu rapat juga membahas penguatan publikasi informasi harga ini melalui media website kota, videotron dan aksesibilitas harian kepada pimpinan daerah melalui Command Center Kota Padangpanjang.

Rapat diikuti Kepala Bagian Perekonomian dan SDA, Putra Dewangga, S.S., M.Si selaku Ketua Tim Teknis TPID Kota Padang Panjang dan dihadiri anggota TPID di antaranya Kabid Perdagangan dan Industri Disperdakop UKM, Kabid Ekonomi SDA dan Infrastruktur Bappeda, Statistisi Ahli Muda Dinas Kominfo, Perencana Ahli Muda Bappeda, Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda Dispangtan, Pengawas Perdagangan Ahli Muda Disperdakop UKM dan Badan Pusat Statistik Kota Padang Panjang yang diwakili Rindy Primadini. (rmd)

Kebijakan Pro UMKM Dibentuk Wako Fadly Amran Bangun UKM Orientasi Ekspor

BERBAGAI kebijakan yang pro terhadap pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) telah dihadirkan Pemerintah Kota Padangpanjang di bawah kepemimpinan Wali Kota, H. Fadly Amran, BBA Datuak Paduko Malano.

Hal tersebut dikatakannya saat menjadi narasumber pada Talkshow Peran Pemerintah dalam Membangun UKM Berorientasi Ekspor bersama Tribun Network, di Ballroom Hotel Santika Premierpadang, Rabu (10/8).

Dijelaskannya, terletak di tengah-tengah Sumatera Barat sehingga banyak lalu lintas orang di Kota Padangpanjang. Membuat peningkatan bisnis kuliner yang bersandar kepada UMKM dan perdagangan hampir 99 persen.

Beberapa program yang sudah dilakukan dalam peningkatan kesejahteraan UM-

KM dan perdagangan ini, jelas Wako Fadly, dengan menurunkan pajak untuk restoran menjadi 5% dari awalnya 10 persen. Membentuk koperasi syariah, dan mengelompokkan usaha mikro yang ada di Kota Padangpanjang.

"Karena kita dilanda pandemi Covid-19, kita menginginkan tidak ada UMKM yang gulung tikar. Kita turunkan pajak restoran menjadi 5 persen. Kita juga sudah membuat Rumah Wirausaha dengan banyak fasilitas kita berikan. Seperti pelatihan marketing. Kami berharap pemerintah bisa memberi ekosistem yang sehat untuk mereka tumbuh dan berkembang dalam memajukan usahanya," ujarnya.

Fadly juga menambahkan, saat pandemi Covid-19 angka pengangguran di Kota Padang Panjang sebesar 7 persen. Tetapi dengan program-pro-

gram yang dilakukan, akhirnya membuahkan hasil dengan 3 persen penurunan angka pengangguran.

"Saya yakin karena memang pondasi dari ekonomi Kota Padangpanjang adalah perdagangan, khususnya usaha mikro. Ini sudah terbukti berhasil diterapkan oleh Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Barat, salah satunya adalah sentra susu dan sentra kulit," tambahnya lagi.

Talkshow tersebut juga diikuti perwakilan Kementerian Koperasi UKM sebagai keynote speaker. Sebagai narasumber di antaranya gubernur Sumbar, wali Kota Padang, Bukittinggi, Payakumbuh, Bogor, Pariaman, Sawahlunto, Solok, Medan, Makassar, pengamat UMKM, akademisi Fakultas Ekonomi Unand, pengamat marketplace digital serta undangan lainnya. (rmd)

Turunkan Kasus Stunting Perlu Libatkan Seluruh Stakeholder

MENURUNKAN kasus stunting, perlu keterlibatan seluruh stakeholder agar tujuan yang diinginkan tercapai. Hal tersebut diungkapkan Wakil Walikota Padangpanjang, saat membuka diskusi panel manajemen kasus stunting bersama BKKBN Provinsi Sumatera Barat.

"Jadi mari bersama-sama kita bahu-membahu untuk menangani kasus stunting di Padangpanjang," ungkap Wawako Asrul, di Aula Hotel Pangeran, Selasa (9/8).

Wawako Asrul yang juga menjabat sebagai ketua Tim Percepatan Penanganan Stunting (TPPS) menyampaikan, sampai saat ini kasus stunting di Padangpanjang belum tun-

tas dan masih belum mencapai persentase nasional.

"Melalui diskusi panel ini, direncanakan langkah-langkah yang tepat dalam percepatan penurunan stunting di Kota Padang Panjang. Dari sini kita bisa menyiapkan apa saja langkah yang akan kita kerjakan agar kasus stunting ini bisa turun," katanya.

Sementara itu Koordinator Bidang KB/KR Perwakilan BKKBN Sumbar, Rismiati, S.E menyampaikan, kegiatan ini dilaksanakan guna mengetahui apa penyebab stunting dan bagaimana mencegahnya.

Dikatakannya, selama ini di setiap daerah sudah ada Tim Pendamping Keluarga (TPK)

untuk melakukan pendampingan kepada keluarga. Jika tim ini tidak menemukan solusi untuk kasusnya, maka akan dilakukan penanganan lebih lanjut. Selain itu juga sudah ada BAAS (Bapak Asuh Anak Stunting) yang akan dibentuk di setiap daerah.

"Kasus stunting tidak hanya tanggung jawab keluarga, melainkan tugas dan tanggung jawab kita semua," sebutnya.

Diakhir kegiatan, Wawako Asrul menyerahkan bantuan dari BKKBN untuk ibu hamil. Kegiatan ini dihadiri Asisten Administrasi Umum, Martoni, S.Sos, M.Si, kepala OPD terkait, camat, lurah dan undangan lainnya. (rmd)



KLIPING BERITA PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Nama Media : Harian Posmetro Padang



DRS. ASRUL

Wawako Asrul Minta Tugas TKPK Dioptimalkan

PADANG PANJANG, METRO

Wakil Wali Kota, Drs. Asrul minta tugas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dioptimalkan guna memaksimalkan penanggulangan kemiskinan di Kota Padang Panjang. Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Padang Panjang 2022, Kamis (11/8) di Ruang Rapat Bappeda. Wawako Asrul mengatakan, ada beberapa kebijakan penanggulangan kemiskinan di Pemko.

Di antaranya, kebijakan pertumbuhan ekonomi, kebijakan pemenuhan hak dasar, kebijakan perluasan kesempatan kerja, dan kebijakan percepatan pembangunan ketahanan.

"Angka kemiskinan Kota Padang Panjang selama tahun 2021 berada pada angka 5,92 persen. Untuk target penurunan angka kemiskinan tahun ini ditargetkan pada angka 5,64 persen dan pada 2023 diangka 5,36 persen," sebutnya.

Kepala Bappeda, Rusdianto, S.IP, M.M mengatakan, dalam penanggulangan kemiskinan, ada beberapa kendala. Yakni keterpaduan validasi data terbatas, integrasi program kegiatan masih kurang, pendanaan yang masih terbatas, pola kemitraan belum optimal.

Terkait hal tersebut, dikatakannya, pentingnya updating Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sesuai perkembangan, optimalisasi pelaksanaan kegiatan penangan kemiskinan OPD. Serta, optimalisasi keterlibatan unsur terkait dalam penanganan kemiskinan sesuai arahan wali kota dan wakil wali kota.

Sementara itu, Asisten III Setdak, Martoni, S.Sos, M.Si berkesempatan memaparkan hasil studi tiru yang dilakukan TKPK ke Pemko Bandung dan Pemko Cimahi pada 3 Juli lalu.

"Dari kunjungan tersebut, ada beberapa hal yang dapat diadopsi untuk Padang Panjang. Seperti perda tentang penanggulangan kemiskinan, sistem informasi, aplikasi penyusunan RPKD dan LPKD, dan sistem informasi data ketenagakerjaan dan pelatihan terintegrasi," tuturnya. (rmd)

Pemko Padang Panjang Hadirkan Kebijakan Pro Pelaku UMKM

PADANG, METRO

Berbagai kebijakan yang pro terhadap pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) telah dihadirkan Pemerintah Kota Padang Panjang di bawah kepemimpinan Wali Kota, H. Fadly Amran, BBA Datuak Paduko Malano. Hal tersebut dikatakannya saat menjadi narasumber pada Talkshow Peran Pemerintah dalam Membangun UKM Berorientasi Ekspor bersama Tribun Network, di Ballroom Hotel Santika Premier Padang, kemarin.

Dijelaskannya, terletak di tengah-tengah Sumatera Barat sehingga banyak lalu lintas orang di Kota Padang Panjang. Membuat peningkatan bisnis kuliner yang bersandar kepada UMKM dan perdagangan hampir 99 persen.

Beberapa program yang sudah dilakukan dalam peningkatan kesejahteraan



SERTIFIKAT—

Wali Kota Padang Panjang H. Fadly Amran, BBA Datuak Paduko Malano, lihatkan sertifikat narasumber.

UMKM dan perdagangan ini, jelas Wako Fadly, dengan menurunkan pajak untuk restoran menjadi 5 persen dari awalnya 10 persen. Membentuk koperasi syariah, dan mengelompokkan usaha mikro yang ada di Kota Padang Panjang.

"Karena kita dilanda pan-

деми Covid-19, kita menginginkan tidak ada UMKM yang gulung tikar. Kita turunkan pajak restoran menjadi 5 persen. Kita juga sudah membuat Rumah Wirausaha dengan banyak fasilitas kita berikan. Seperti pelatihan marketing. Kami berharap pemerintah bisa

memberi ekosistem yang sehat untuk mereka tumbuh dan berkembang dalam memajukan usahanya," ujarnya.

Fadly juga menambahkan, saat pandemi Covid-19 angka pengangguran di Kota Padang Panjang sebesar 7 persen. Tetapi dengan

program-program yang dilakukan, akhirnya mem-buahkan hasil dengan 3 persen penurunan angka pengangguran.

"Saya yakin karena memang pondasi dari ekonomi Kota Padang Panjang adalah perdagangan, khususnya usaha mikro. Ini sudah terbukti berhasil diterapkan oleh Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Barat, salah satunya adalah sentra susu dan sentra kulit," tambahnya lagi.

Talkshow tersebut juga diikuti perwakilan Kementerian Koperasi UKM sebagai keynote speaker. Sebagai narasumber di antaranya gubernur Sumbang, wali Kota Padang, Bukittinggi, Payakumbuh, Bogor, Pariaman, Sawahlunto, Solok, Medan, Makassar, pengamat UMKM, akademisi Fakultas Ekonomi Unand, pengamat marketplace digital serta undangan lainnya. (rmd)

TPID Laksanakan Evaluasi Pemantauan Harga Pangan

PDG.PANJANG, METRO

Guna mengevaluasi pelaksanaan pemantauan harga pangan strategis di Kota Padang Panjang, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Padang Panjang melaksanakan Rapat Teknis di Ruang VIP Balai Kota, kemarin. Asisten Administrasi Umum, Martoni, S.Sos, M.Si yang memimpin rapat menyampaikan, pemantauan harga pangan strategis penting dilakukan setiap hari untuk mengetahui perkembangan ketersediaan pasokan pangan dan kemampuan membeli masyarakat yang berujung pada perhitungan inflasi daerah.

Dari hasil evaluasi yang dilakukan dalam rapat tersebut, diperoleh informasi bahwa pemantauan harga pangan strategis yang secara teknis dilakukan petugas Dinas Pangan dan Pertanian (Dispangan) dan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Me-

nengah (Disperdakop UKM) di lapangan telah berjalan lancar setiap hari kerja tanpa kendala yang cukup berarti.

Pemantauan dilakukan dengan metode yang teruji sesuai ketentuan di Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan. Dengan demikian maka data yang dihasilkan juga merupakan data yang cukup reliable (dapat diandalkan).

Sesuai dengan program kerja TPID Kota Padang Panjang, maka data dari kedua OPD tersebut dikirim secara real time oleh petugas lapangan dengan menggunakan aplikasi Udajang dan info-pangan Padang Panjang untuk diverifikasi Tim Verifikator dari Sekretariat TPID Kota Padang Panjang.

"Data yang sudah diverifikasi otomatis tampil sebagai info pangan. Masyarakat yang ingin mengetahui harga 45 komoditi pa-



PIMPIN— Asisten Administrasi Umum, Martoni, S.Sos, M.Si Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Padang Panjang melaksanakan Rapat Teknis di Ruang VIP Balai Kota, kemarin. Asisten Administrasi Umum, Martoni, S.Sos, M.Si yang memimpin rapat menyampaikan

ngan hari itu, dapat mengaksesnya melalui aplikasi Udajang mulai pukul 14.00 WIB. Aplikasi Udajang adalah aplikasi yang mengelola informasi resmi Pemerintah Kota Padang Panjang yang bisa didownload di Play Store," jelasnya.

Selain itu rapat juga membahas penguatan publikasi informasi harga ini melalui media website kota,

videotron dan aksesibilitas harian kepada pimpinan daerah melalui Command Center Kota Padang Panjang.

Rapat diikuti Kepala Bagian Perekonomian dan SDA, Putra Dewangga, S.S., M.Si selaku Ketua Tim Teknis TPID Kota Padang Panjang dan dihadiri anggota TPID di antaranya Kabid Perdagangan dan Industri

Disperdakop UKM, Kabid Ekonomi SDA dan Infrastruktur Bappeda, Statistisi Ahli Muda Dinas Kominfo, Perencana Ahli Muda Bappeda, Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda Dispangan, Pengawas Perdagangan Ahli Muda Disperdakop UKM dan Badan Pusat Statistik Kota Padang Panjang yang diwakili Rindy Primadini. (rmd)



ARAHAN— Kepala Kwardcab 12 Padang Panjang, Dr. Novi Hendri, SE, M.Si Datuak Bagindo Saidi di halaman Kantor Kwardcab 12, Gedung Sjafei bersama orang tua masing-masing berikan arahan, Kamis (11/8).

Kontingen Jambore Nasional Pramuka Berangkat ke Cibubur

PADANG PANJANG, METRO
Kontingen Kwardcab 12 Kota Padang Panjang berangkat menuju Jambore Nasional Pramuka yang dilaksanakan di Cibubur.

Sebanyak 16 orang dilepas Kepala Kwardcab 12 Padang Panjang, Dr. Novi Hendri, SE, M.Si Datuak Bagindo Saidi di halaman Kantor Kwardcab 12, Gedung Sjafei bersama orang tua masing-masing, Kamis (11/8).

Pada pelepasan tersebut, Novi meminta kepada semua pihak untuk mendoakan agar perjalanan rombongan ke Cibubur berjalan lancar dan sampai dengan selamat. Rombongan beserta pembina dan pengurus, berangkat menggunakan jalur darat dengan satu bus. "Selama perjalanan, tetap jaga kesehatan dan juga terus menyatu dengan rombongan. Jangan pergi tanpa sepengetahuan dari kakak pembina," ujarnya.

Ia juga mengatakan, sebagai perwakilan dari Kota Padang Panjang, harus bisa menorehkan prestasi dan memberikan yang terbaik untuk Kota Padang Panjang. "Kami titipkan nama Kota Padang Panjang untuk kita harumkan di Jambore Nasional ini. Tetap semangat, ada perlombaan dan kegiatan di sana, berikan yang terbaik," tambahnya. (rmd)



Nama Media : Harian Rakyat Sumbar

RSUD Padangpanjang Dilengkapi Gedung NICU

Walikota Padangpanjang Lakukan Peletakan Batu Pertama

JON KENEDI

Harian Rakyat Sumbar

Walikota Padangpanjang Fadly Amran melakukan peletakan batu pertama pembangunan Gedung NICU (Neonatal Intensive Care Unit) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Padang Panjang, Kamis (11/4).

NICU merupakan ruangan bagi bayi baru lahir yang memerlukan perawatan khusus. Pembangunan NICU berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang didapat Pemko melalui Pemerintah Pusat. Pagu anggaran Rp4 miliar, bangunannya ditargetkan rampung dalam kurun waktu 120 hari kerja tepatnya 26 November.

Wako Fadly menyampaikan terima kasih kepada semua pihak, termasuk Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Sumatera Barat. Menurutnya, meraih bantuan pusat bukanlah hal yang mudah. Dirinya berharap OPD lain dapat berupaya meraih DAK untuk Padang Panjang.

"Pembangunan ini untuk ke-

maslahatan masyarakat. Waktu pendek, efektifkan waktu pengerjaannya. Kebut di bulan pertama. Jika ada kendala, kami bersedia untuk diajak konsultasi," sebutnya kepada pelaksana, CV Niko Kurnia.

Kepala Dinkes Sumbar, dr. Lila Yanwar, MARS mengatakan, NICU yang dikembangkan RSUD Kota Padang Panjang menuju standar rumah sakit yang belum banyak dimiliki rumah sakit lain di Sumbar.

"Dengan adanya NICU merupakan kemajuan besar. Kita harapkan makin meningkat layanan di RSUD. Hanya di RSUD Padangpanjang yang ada 4 dokter anak di Sumbar," ujarnya.

Lebih lanjut Lila menekankan pentingnya RSUD menjadi BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) pada 2023. Ia juga meminta RSUD

mengembangkan Layanan Kesehatan Tradisional. Saat ini hal itu turut menjadi perhatian penting bagi pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.

Sementara itu, Plt. Direktur, dr. Yuhisdiarman, Sp.THT, KL menuturkan, NICU merupakan ruangan yang terintegrasi dengan ruangan lain. Memiliki luas keseluruhan 24 x 16 meter persegi, tiga lantai. Keterbatasan anggaran, NICU diselesaikan lebih awal. "Harapannya bisa dianggarkan melalui APBD untuk pembangunan keseluruhan," ungkapnya.

Tampak hadir, Sekdako, Sonny Budaya Putra, A.P, M.Si, Ketua TP-PKK, dr. Dian Puspita Fadly Amran, Sp.JP, Anggota DPRD, Dr. Novi Hendri, SE, M.Si, unsur dari Kejaksaan, jajaran pejabat Pemko dan undangan lainnya. (ned)



PELETAKAN batu pertama pembangunan Gedung NICU RSUD Kota Padangpanjang.

Inovasi Poliklinik Cegah Diapresiasi Walikota

Ganting, Rakyat Sumbar— Walikota Padangpanjang Fadly Amran mendukung inovasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang tengah mempersiapkan Poliklinik Cegah.

Cegah ialah akronim dari Cerdik Sehat dengan Toga dan Akupresur.

Dikatakannya, inovasi RSUD yang dikembangkan bersama Akupresuris, Ns. Rika Roza, M.Kep ini menjadi perhatian yang diundangkan oleh Kementerian Kesehatan sebagai layanan kesehatan tradisional.

"Ini hendaknya bisa berkembang dengan baik di RSUD karena juga menjadi concern Kementerian Kesehatan," sebutnya, Kamis (11/8).

Rika Roza mengatakan, Poliklinik Cegah dengan layanan kesehatan tradisional ini merupakan satu-satunya di Sumbar.

"Di Poliklinik Cegah ini kita melayani pengobatan sakit kepala, myalgia, vitalitas, relaksasi, meningkatkan kualitas tidur dan mengurangi beberapa gejala penyakit lainnya," tutur Rika



WALIKOTA Padangpanjang Fadly Amran saat mengunjungi inovasi Poliklinik Cegah RSUD Kota Padangpanjang.

yang saat ini mempersiapkan diri pada seleksi tenaga kesehatan teladan Sumbar, mempekerjakan posisi terbaik dari dua orang yang terseleksi.

Sementara itu, Ketua Tim Pendamping, Ns. Mery Febrieni, S.Kep, M.Kes dari Dinkes Kota Padang Panjang menjelaskan, pelayanan kesehatan tradisional ini didukung sejumlah regu-

lasi. Yaitu Undang-undang Kesehatan No. 36 Tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah No. 107 Tahun 2009.

"Di mana bentuk pelayanan kesehatan itu adalah pelayanan kesehatan tradisional," ungkapnya.

Pada PP No. 107/2009, sebutnya, ada tiga bentuk pelayanan kesehatan tradisional. Pertama, pelayanan kesehatan empiris

bukan oleh tenaga kesehatan seperti hipnoterapis. Kemudian pelayanan kesehatan komplementer oleh tenaga kesehatan yang ada di tengah masyarakat.

"Tapi kalau dia berpraktek di fasilitas kesehatan, itu namanya pelayanan kesehatan tradisional integrasi. Boleh di rumah sakit termasuk di Puskesmas," jelasnya. (ned)



Nama Media : Harian Rakyat Sumbar



KETUA Kwartir Pramuka Dr. Novi Hendri, SE, M.Si ketika melepas kontingen Jamnas Kota Padangpanjang menuju Cibubur.

Kontingen Jamnas Padangpanjang Berangkat ke Cibubur

Guguk Malintang, Rakyat Sumbar—Kontingen Kwartir 12 Kota Padangpanjang berangkat menuju Jambore Nasional Pramuka yang dilaksanakan di Cibubur.

Sebanyak 16 orang dilepas Kepala Kwartir 12 Padangpanjang, Dr. Novi Hendri, SE, M.Si Datuak Bagindo Saidi di hala-

man Kantor Kwartir 12, Gedung Sjafei bersama orang tua masing-masing, Kamis (11/8).

Pada pelepasan tersebut, Novi meminta kepada semua pihak untuk mendoakan agar perjalanan rombongan ke Cibubur berjalan lancar dan sampai dengan selamat. Rombongan beserta pembina dan pengurus,

berangkat menggunakan jalur darat dengan satu bus.

“Selama perjalanan, tetap jaga kesehatan dan juga terus menyatu dengan rombongan. Jangan pergi tanpa sepengetahuan dari kakak pembina,” ujarnya.

Ia juga mengatakan, sebagai perwakilan dari Kota Padangpanjang, harus bisa menoreh-

kan prestasi dan memberikan yang terbaik untuk Kota Padangpanjang.

“Kami titipkan nama Kota Padang Panjang untuk kita harumkan di Jambore Nasional ini. Tetap semangat, ada perlombaan dan kegiatan di sana, berikan yang terbaik,” tambahnya. (ned)



Nama Media : Harian Khazanah

RSUD Padang Panjang akan Dilengkapi NICU

Padang Panjang, Khazanah — Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Panjang yang digadang-gadang akan jadi rumah sakit berskala internasional, kini semakin melengkapi fasilitas layanan medisnya dengan Neonatal Intensive Care Unit (NICU), kemarin Walikota Fadly Amran meletakkan batu pertama menandai dimulai pembangunan unit baru itu.

Neonatal itu adalah fasilitas untuk bayi baru lahir berusia 0-28 hari. Lalu intensive care unit itu bayi-bayi yang membutuhkan perawatan intensif setelah lahir. Melengkapi Rumah Sakit yang berskala internasional Ruang NICU atau neonatal intensive care unit merupakan

ruang perawatan intensif di rumah sakit yang disediakan khusus untuk bayi baru lahir yang mengalami gangguan kesehatan.

Keberadaan ruang NICU ini tentunya sangat diperlukan di rumah sakit, khususnya bagi rumah sakit yang melayani persalinan. "NICU merupakan perawatan intensif yang dikhususkan untuk bayi-bayi yang baru lahir,"

"NICU ini merupakan fasilitas ruangan bagi bayi baru lahir yang memerlukan perawatan khusus," kata Walikota Fadly Amran kemarin.

Pembangunan NICU berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang didapat Pemko

BACA HAL-7



Walikota Fadly Amran saat peletakan batu pertama pembangunan fasilitas NICU RSUD Padang Panjang

RSUD Padang Panjang

DARI HALAMAN 1

melalui Pemerintah Pusat. Pagu anggaran Rp4 miliar, bangunannya ditargetkan rampung dalam kurun waktu 120 hari kerja tepatnya 26 November.

Wako Fadly menyampaikan terima kasih kepada semua pihak termasuk Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Sumatera Barat. Menurutnya, meraih bantuan pusat bukanlah hal yang mudah. Dirinya berharap OPD lain dapat berupaya meraih DAK untuk Padang Panjang.

"Pembangunan ini untuk kemaslahatan masyarakat. Waktu pendek, efektifkan waktu pengerjaannya. Kebut di bulan pertama. Jika ada kendala, kami bersedia untuk diajak konsultasi," sebutnya kepada pelaksana, CV Niko Kurnia.

Kepala Dinkes Sumbar, dr. Lila Yanwar, MARS mengatakan, NICU yang dikembangkan RSUD Kota Padang Panjang menuju standar rumah sakit yang belum banyak dimiliki rumah sakit lain di Sumbar.

"Dengan adanya NICU merupakan kemajuan besar. Kita harapkan makin meningkat layanan di RSUD. Hanya di RSUD Padang Panjang yang ada 4 dokter anak di Sumbar," ujarnya.

Lebih lanjut Lila menekankan pentingnya RSUD menjadi BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) pada 2023. Ia juga meminta RSUD mengembangkan Layanan Kesehatan Tradisional. Saat ini hal itu turut menjadi perhatian penting bagi pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.

Sementara itu, Plt. Direktur, dr. Yuhisdjarman, Sp.THT, KL menuturkan, NICU merupakan ruangan yang terintegrasi dengan ruangan lain.

Direktur yang juga spesialis THT itu mengatakan "Yang disarankan ke NICU ini beragam, ada yang baru lahir langsung dirawat di NICU, atau bisa juga sudah pulang ternyata ada permasalahan terhadap kesehatan seperti ada gangguan pernapasan dan lain-lain," kata dia

Lebih lanjut ujarnya, untuk indikasi bayi yang harus dirawat di ruang NICU misal, bayi kurang bulan terutama dengan kehamilan di bawah 34 Minggu.

Sedangkan di atas 34 Minggu, kalau anaknya sehat, tidak ada permasalahan pernapasan, minumnya

lancar maka tidak perlu di NICU, cukup di ruang perawatan yang biasa.

"Kalau untuk NICU ini biasanya untuk yang prematur. Selain itu bisa juga karena berat badan di bawah 1500 gram atau juga di bawah 2000 gram. Kalau di bawah 2000 gram, ini masih ada kemungkinan bisa di NICU atau di ruang perawatan biasa," jelasnya.

Lalu karena, ada permasalahan pernapasan yang membutuhkan peralatan seperti ventilator atau alat bantu napas lainnya. Kemudian bisa juga bayi-bayi yang baru menjalani operasi. Jadi selesai operasi dia akan dirawat di NICU tersebut.

"Jadi biasanya yang di rawat di ruang NICU karena kurang bulan, ada infeksi berat diikuti gangguan pernapasan dan menelan. Lalu prematur, yang refleksi menyusui kurang bagus, sehingga butuh peralatan bantuan," katanya

Artinya sebegitu penting nya keberadaan ruangan NICU yang memiliki luas keseluruhan 24 x 16 meter persegi, tiga lantai. Hendaknya Nicu ada di setiap rumah sakit. Karena tidak seluruh bayi lahir dengan keadaan sehat, tidak seluruh bayi cukup bulan tapi karena keterbatasan anggaran, NICU diselesaikan lebih awal.

Melalui kesempatan ini "Harapannya bisa dianggarkan melalui APBD untuk pembangunan keseluruhan," ungkapnya

RSUD Padang Panjang adalah salah satu dari sedikit RSUD yang belum melekatkan nama-nama tokoh sebagai *call name* nya. Misalnya seperti RSUD Dr. MA Hanafiah di Batusangkar, RSUD Dr. Adnan WD di Payakumbuh, RSUD M. Natsir di Solok dan sebagainya.

Tampak hadir, Sekdako, Sonny Budaya Putra, Ketua TP-PPK, dr. Dian Puspita Fadly Amran Anggota DPRD, Novi Hendri unsur dari Kejaksaan, jajaran pejabat Pemko dan undangan lainnya. (Paulhendri) teks foto Walikota Padang Panjang Fadly Amran saat meletakkan batu pertama pembangunan NICU di RSUD Padang Panjang.

■ paulhendri



Nama Media : Harian Khazanah

NOVI HENDRI ANGGOTA DPRD PADANG PANJANG

Fasilitasi CSR PDAM Bagi Warga Kurang Mampu

Padang Panjang, Khazanah—
Novi Hendri Anggota Ketua
Bapemperda DPRD Kota Padang
Panjang dari partai Golongan
Karya (Golkar) bantu fasilitasi
mendorong agar Corporate Sosial
Responsibilities (CSR) Perusahaan
Daerah Air Minum (PDAM) di
Padang Panjang ikut membantu
biaya pemasangan baru Air di
rumah warga kurang mampu yang
terletak di RT 15 Silaing Bawah
Padang Panjang

Niat baik wakil rakyat itu
disambut baik oleh direktur PDAM
kota Padang Panjang Adrial
A.Bakar .dia menyetujui proposal
permohonan pasang saluran baru
air PDAM kerumahnya warga
kurang mampu atas nama Saidil
RT 15 Silaing Bawah yang
ditanda tangani oleh lurah Silaing
Bawah dan RT 15 tersebut

Pagi menjelang siang ,Senin
8/8 bertepatan dengan hari Asyura
1444 H Novi Hendri
mendapatkan kehormatan dari
PDAM sebagai orang yang
memfasilitasi CSR pasangan baru
rumah warga kurang mampu itu
untuk menyerahkan langsung

saluran baru secara simbolis yang
telah dipasang teknisi PDAM
tersebut disaksikan lurah Silaing
Bawah Dedi Andrian dan RT
setempat

Novi mengatakan dia sangat
berterima kasih pada PDAM yang
telah mengabulkan permintaan
CSR nya bagi warga kurang
mampu dalam bentuk pemasangan
saluran rumah baru .program ini
sangat bagus dan bisa membantu
warga kurang mampu dalam
menikmati air bersih sebagai
kebutuhan hidup.

Direktur PDAM Adrial
mengatakan, kebijakan tersebut
diambil sebagai bentuk
kepedulian pemerintah (BUMD)
terhadap masyarakat khususnya
warga miskin, serta untuk
pengembangan PDAM Padang
Panjang ke depan.

Sebenarnya program ini ada di
PDAM katanya tapi dalam
bentuk kerja sama dengan dinas
perindag kota Padang Panjang
karena Pandemi program ini
terhenti, namun kali ini datang
dari usulan aspirasi wakil rakyat
kita Novi Hendri yang juga



SIMBOLIS- Novi Hendri saat menempelkan stiker CSR PDAM usai
meyerahkan secara simbolis pada warga kurang mampu di
dampingi direktur PDAM Adrial ,lurah Silaing Bawah Dedi Andrian
dan RT setempat (foto: Paulhendri).

mantan ketua DPRD Padang
Panjang dua periode (2009-2014
dan 2014-2019)

Sementara itu, Saidil , warga
penerima bantuan mengaku
pihaknya merasa sangat bersyukur
dengan adanya bantuan tersebut,
karena dengan program itu ia dan
keluarganya akan dapat menikmati

air bersih untuk kebutuhan sehari-
hari.

“Kami nantinya tidak jauh-
jauh lagi mencari air bersih,
karena ada bantuan gratis yang
langsung dipasang hingga ke
rumah,” ucapnya ■ Paulhendri.



Nama Media : Harian Koran Padang

Terapkan e-Katalog Lokal, OPD Diminta Segera Daftarkan UMKM Mitra



RAPAT percepatan penerapan e-Katalog Lokal guna memberdayakan pengusaha lokal di Kota Padangpanjang yang digelar di Hall Lantai III Balai Kota, Kamis (11/8).

PADANGPANJANG, KP - Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Padangpanjang, Sonny Budaya Putra meminta setiap organisasi perangkat daerah (OPD) mendata setiap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang menjadi mitra masing-masing untuk didaftarkan ke dalam e-Katalog.

Hal itu disampaikannya saat memimpin rapat percepatan penerapan e-Katalog Lokal guna memberdayakan pengusaha lokal di Kota Padangpanjang yang digelar di Hall Lantai III Balai Kota, Kamis (11/8).

"UMKM ataupun perusahaan yang menjadi mitra OPD tersebut, harus didaftarkan di aplikasi e-Katalog. Fasilitas dan dampingi, nanti akan dievaluasi kembali. Karena September akan ada evaluasi oleh pusat. Ke depan, kita akan utamakan mereka yang telah terdaftar tersebut. Kita berharap APBD Padang Panjang Rp600 miliar itu beredar di Padang Panjang," tekannya.

Dijelaskannya, beberapa waktu lalu ada perte-

muan virtual dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). "Dalam evaluasinya, akan ada sanksi bagi daerah yang tidak menerapkan e-Katalog lokal ini," ungkapnya.

Pelaksanaan sistem e-Katalog ini, sebutnya lagi, sesuai dengan instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, UMKM dan Koperasi, dalam sukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia.

Sementara itu, Sub Koordinator Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setdako, Hendra Gusfia mengatakan, untuk mendaftar di e-Katalog itu syaratnya mudah dan tidak berbiaya.

"Dengan telah mendaftar menggunakan e-Katalog itu, etalasnya sudah ada. Penyerapan anggaran lebih cepat, transparan, hemat biaya dan yang penting keterlibatan penyedia barang dan jasa lokal," tambahnya. (sup)



KLIPING BERITA PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Nama Media : Mingguan Lintas Media

MENUJU JAMBORE NASIONAL Wako Fadly Amran Lepas Kontingen Pramuka



PDG. PANJANG - Walikota H. Fadly Amran, BBA Datuak Paduko Malano melepas kontingen Kwardcab 12 Paramuka Kota Padang Panjang menuju Jambore

Bersambung ke hlm. 11

Wako Fadly...

Nasional Pramuka di Cibubur Tahun 2022, di Pendopo Rumah Dinas Wali Kota, Sabtu (6/8).

Jambore yang dilaksanakan sekali lima tahun ini, akan diikuti kontingen Padang Panjang 29 orang pada 14-20 Agustus mendatang.

Rombongan akan berangkat pada 11 Agustus ini.

Wako Fadly berpesan kepada adik-adik Pramuka yang mengikuti jambore untuk selalu menjaga diri, jaga kesehatan dan tingkatkan kolaborasi dalam pelaksanaan. "Kehadiran adik-adik semua hari ini adalah langkah baik. Suatu anugerah yang mana adik-adik lain di luar sana tidak bisa mendapatkannya. Kegiatan yang diikuti ini mendapatkan makna kemandirian, menjaga diri sendiri, dan berkolaborasi," sebutnya.

Fadly juga menyampaikan, nikmati pengalaman selama mengikuti jambore. Jadilah diri yang bisa membanggakan Kota Padang

Panjang. Selalu jaga kesehatan dan keselamatan selama mengikuti jambore. "Kami juga berpesan kepada para orang tua, biarkan anak-anak kita ini mandiri. Kami yakin pengalaman yang didapatkan sekarang, tidak akan terlupakan oleh anak-anak kita ini kelak," tuturnya lagi.

Kepala Kwardcab 12 Pramuka Padang Panjang, Dr. Novi Hendri, S.E, M.Si Datuak Bagindo Saidi juga meminta doa dan dukungan dari semua pihak untuk kontingen jambore. "Kami mohon doa semuanya, mudah-mudahan selama perjalanan dan mengikuti kegiatan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Saya yakin banyak hal dan ilmu yang akan didapatkan," tuturnya.

Ikut hadir Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Drs. M. Ali Tabrani, M.Pd, perwakilan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, kepala SMP dan MTs se-Kota Padang Panjang, orang tua kontingen, serta undangan lainnya.

(son/hms)

Dukcapil Juara I Lomba Perangkat Daerah Terinovatif Kota Padang Panjang 2021

Pdg. Panjang, Lintas Media

Sesuatu pekerjaan bila dikerjakan dengan serius dan melibatkan banyak orang. Yakinlah, pasti akan membuahkan hasil yang sempurna. Hal tersebut terbukti dengan terpilihnya, Dinas Dukcapil menjadi JUARA I dalam Lomba Perangkat Daerah Terinovatif Kota Padang Panjang Tahun 2021. Beragam Inovasi telah dilahirkan oleh kantor pelayanan publik, guna memudahkan masyarakat dalam mengurus segala keperluan administrasi kependudukannya.

Selaku OPD, memiliki peringkat pertama sebagai OPD banyak melahirkan inovasi, berhak mendapat penghargaan dari Pemerintah Kota Padang Panjang. Bersama OPD lainnya, piagam penghargaan hasil jerih payah secara bersama, diserahkan oleh Wakil Walikota Padang Panjang, Drs. Asrul di Hall Lantai 3 Balaikota pada Selasa 28 Desember 2021 pekan lalu. Sebagai reward, pemerintah daerah juga memberikan uang perangsang sebesar Rp 7.500.000.



Kepala Dukcapil, Maini menjawab Lintas Media mengatakan, reward atau penghargaan ini dipersembahkan untuk semua pegawai Dukcapil yang telah bekerja siang malam guna mengujudkan administrasi yang cepat, akurat dan terukur, tetap mengacu pada aturan dan UU berlaku.

"Tidak mudah memang, tapi berkat kerja Team Work yang solid dan jalannya garis kordinasi antar bidang satu dengan bidang yang lain

membuat semua pekerjaan jadi lancar. Artinya, Capil dalam menerapkan prinsip kerja satu untuk semua, merupakan motto yang selalu dipegang teguh oleh anak anak dalam bekerja," ujar Maini.

Lebih jauh Sang Kadis mengatakan, wujud dari kerja keras itu, terlihat dari raihan prestasi telah dicapai Dikcapil Padang Panjang, mulai tingkat Provinsi, kota maupun di tingkat Nasional. Semua, penghargaan itu dipersembahkan untuk semua ASN dan pegawai

honorer lingkup Dukcapil Padang Panjang.

Tanpa bantuan dan jalinan kerjasama yang terjalin harmonis selama ini, mustahil segala prestasi ini dapat Dukcapil gapai. Bertahun-tahun menjaga kekompakan ini. Bukan kerja gampang, berbagai kendala dan hadangan merintang jalannya birokrasi di Dukcapil ini. Berkat, sentuhan kekeluargaan yang kuat semua kendala dan hadangan dapat dilalui.

Semoga ke depannya kami selalu bisa berinovasi dalam memberikan layanan yang membahagiakan bagi masyarakat Padang Panjang. Dengan, puluhan inovasi telah dilahirkan akan sangat berguna bagi kelancara masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukannya.

Untuk itu, kami menghimbau pada masyarakat untuk cepat melengkapi administrasi kependudukannya. Dengan banyaknya inovasi dilahirkan Dukcapil, semua untuk mempermudah masyarakat dalam mengurus segala keperluan administrasi kependudukannya. (Son)

Universitas Baiturrahmah Social Gelar Kesehatan Gratis di Puskesmas Gunung

PDG. PANJANG - Dalam rangkaian kegiatan University Social Responsibility (USR) V kesehatan gratis dengan dokter spesialis di Puskesmas Gunung, Kelurahan Ekor Lubuk, Sabtu (30/7). Universitas Baiturrahmah (Unbrah) di Padang Panjang, digelar pelayanan

Sebanyak 40-an tenaga kesehatan yang terdiri dari dokter spesialis, dokter umum dan tenaga kesehatan lainnya serta 100 mahasiswa dilibatkan untuk melayani masyarakat yang datang baik dari Kota Padang Panjang maupun dari Kecamatan Batipuh dan Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar.

Kepala Puskesmas Gunung, Widra Yeni, SKM mengapresiasi kegiatan USR V Unbrah ini. "Apresiasi yang luar biasa bagi Unbrah atas diadakannya kegiatan ini di Puskesmas Gunung. Biasanya kalau ada pelayanan kesehatan gratis itu tingkat pelayanan dasar saja, tetapi kali ini disediakan banyak sekali poli. Apalagi di sini, satu orang bisa diperiksa lebih dari satu spesialis," ucapnya.

Dikatakannya, layanan pendaftaran untuk periksa kesehatan ini sampai jam 2 siang dan pelayanannya akan berlangsung hingga sore.

Ketua Panitia, dr. Aryaldy Zulkarnaini, Sp.PD menyampaikan, kegiatan ini merupakan kegiatan tahunan yang digelar Unbrah.

"Terakhir kita gelar kegiatan serupa dua tahun lalu di Maninjau. Ada semua spesialis kita siapkan. Di antaranya penyakit dalam, anak, bedah, Obgyn, mata, THT, neurologi/ syaraf, psikiatri, paru, kulit dan kelamin. Selain itu juga ada spesialis gigi dan mulut," ungkapnya.

Ditambahkannya, selain periksa kesehatan, pihaknya juga menyediakan layanan konsultasi serta ada penyuluhan kesehatan juga.

"Semoga kegiatan kita ini mendapat keberkahan dan kami mengucapkan terima kasih kepada Puskesmas Gunung yang telah menyediakan tempat untuk kegiatan kita ini. Mudah-mudahan warga dapat memanfaatkan momen ini," tuturnya. (son)



Nama Media : Mingguan Indonesia Raya

Padang Panjang Akan Segera Bentuk BLUD

Padang Panjang, Indonesia Raya__Tidak lama lagi Pemerintah Kota Padang Panjang akan membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan segera membentuk BLUD Puskesmas.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kota (Sekdako), Sonny Budaya Putra, A.P, M.Si saat Rapat Koordinasi BLUD Kota Padang Panjang Tahun 2022 di Aula BPKD, Kamis (4/8) kemarin.

Sekdako Sonny menyampaikan, dengan adanya BLUD akan ada beberapa fleksibilitas pengelolaan keuangan yang mampu mempercepat pelayanan kepada masyarakat.

Disampaikan, BLUD yang ada di Kota Padang Panjang agar segera melakukan penyesuaian dengan mempedomani Permendagri 79 Tahun 2018 tentang BLUD.

"Pimpinan OPD yang memiliki UPTD yang berpotensi untuk menjadi BLUD agar segera mengambil langkah-langkah pembentukan BLUD. Terutama empat puskesmas yang ada di Kota Padang Panjang," tegasnya.

Sementara itu Kabag Perekonomian dan Sumberdaya Alam, Putra Dewangga, S.S, M.Si selaku ketua penyelenggara menyampaikan, sesuai dengan Permendagri 56/2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka Bagian Perekonomian dan SDA ditugaskan untuk menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis evaluasi BLUD. Selain itu menyiapkan bahan koordinasi kebijakan teknis evaluasi BLUD, menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan kebijakan evaluasi BLUD dan menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan, evaluasi, analisis dan pelaporan kebijakan perencanaan, pengembangan dan kerja sama BLUD.

Kepala Perwakilan BPKP Sumbar, diwakili Koordinator Pengawasan Bidang Akuntan Negara, Heru Setiawan selaku narasumber menyampaikan, pembentukan BLUD tidak sulit. Sepanjang syarat substantif, teknis dan administratif terpenuhi, maka dalam waktu yang tidak beberapa lama kepala daerah sudah dapat mengeluarkan keputusan pembentukan BLUD.

"BPKP Provinsi Sumbar siap memberikan pendampingan nantinya," sebutnya.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, dr. Lila Yanuar, MARS selaku narasumber kedua menyampaikan, Puskesmas di Kota Padang Panjang diharapkan dapat segera dijadikan BLUD. Karena pengalaman berbagai BLUD Puskesmas di Sumatera Barat menunjukkan bahwa sistem BLUD tidak hanya memberikan banyak kemudahan, tapi juga mendorong efisiensi dan pengembangan layanan. **(Titen)**



KLIPING BERITA

PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Nama Media : Mingguan Zaman



Kota Padang Panjang

Pemko Padang Panjang Adakan MoU dengan BSI

WALIKOTA, H. Fadly Amran, BBA Datuak Paduko Malano meneken Memorandum of Understanding (MoU) bersama Bank Syariah Indonesia (BSI) saat Sosialisasi Prapensiun Bagi PNS Kota Padang Panjang yang akan Memasuki Masa Purnabakti yang digelar BSI dan PT Taspen, di Hall Lantai III Balai Kota, Kamis (8/4/22).

Kesepakatan kerja sama yang dilakukan antara Pemerintah Kota dengan BSI ini tentang Kemitraan Penyediaan dan Pemanfaatan Layanan Jasa Perbankan Syariah di Kota Padang Panjang.

Sementara itu, di hadapan PNS yang akan memasuki masa purnabakti, Wako Fadly mengatakan, sebagai abdi negara dan aparaturnya pemerintah, semua PNS akan sampai di ujung pengabdian. Baik itu hitungan bulan, setahun atau dua tahun ke depan. Maka susun dan rancang rencana untuk masa pensiun nanti.

"Memasuki masa pensiun PNS bukan berarti dunia bapak ibu ikut berhenti juga. Masih banyak hal yang bisa kita laku-

kan, dan masih banyak peran yang bisa dimainkan di tengah masyarakat selepas menyelesaikan tugas pengabdian sebagai PNS. Baik itu mengabdikan di bidang sosial kemasyarakatan, melakukan kerja sosial, kerja edukasi, melakukan pemberdayaan dan lainnya," ujarnya.

Fadly juga berharap apa yang disampaikan BSI dan Taspen akan memberi manfaat bagi yang akan memasuki masa purnabakti. Semoga program-program yang ditawarkan BSI dan Taspen akan mampu menunjang rencana-rencana baik yang sudah direncanakan sebelumnya.

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada BSI dan Taspen atas inisiatifnya mengenalkan program-program kepada para calon purnabakti PNS di lingkungan Pemko Padang Panjang.

Area Manager BSI Wilayah Sumbang, Budi Abdiriva menyebutkan, memasuki masa purnabakti PNS pihaknya menjadi mitra Taspen, sudah harus menyiapkan apa yang harus dihadapi saat memasuki masa purnabakti tersebut.

"Salah satu program yang nanti akan hadir, kami akan menggabungkan bapak ibu ke grup WhatsApp yang itu akan dikoordinir BSI. Kita akan mengundang para pelaku usaha dan juga orang-orang yang sudah punya pengalaman menjalankan aktivitas berbisnis," tuturnya.

Ia menyebutkan, BSI selama satu tahun bergabung sudah masuk ke tujuh bank besar di Indonesia, dan satu-satunya Bank syariah yang masuk tujuh besar ini.

"Tujuan kita melaksanakan kegiatan ini dalam rangka implementasi penyelenggaraan jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Dengan kondisi saat ini belum semua PNS yang akan memasuki masa purnabakti telah siap diri, baik secara mental maupun keterampilan untuk menghadapi masa pensiun," ungkap Kepala BKPSDM, Rudy Suarman, A.P yang juga selaku ketua pelaksana.

Ikut hadir Consumer Financing Manager Kantor Pusat BSI, Dimas, Branch Manager PT Taspen Cabang Padang, Ita Wiana Astuti, Service Sector

Head PT Taspen Cabang Padang, Akhmad Nawawi, Branch

Manager BSI Padang Panjang II, Iswandi, staf ahli, asisten,

kepada OPD dan undangan lainnya. (edmon)

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



KOMINFO
Padang Panjang

KLIPPING
BERITA



Kominfo Padang Panjang



Jalan Prof. M. Yamin Nomor 2



diskominfo.padangpanjang@gmail.com